

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

a. Dinasti Politik

1. Pengertian Dinasti Politik

Dalam wawasan ilmu sosial dan ilmu politik, dinasti politik merupakan sebuah budaya yang sudah melekat sejak dahulu. Jika dahulu dinasti politik identik dengan negara yang menganut sistem monarki yang dimana kekuasaan dijalankan oleh suatu keluarga yang mempunyai ikatan darah langsung. Kemudian juga, peralihan kekuasaannya harus dan wajib diturunkan kepada keturunannya untuk melanjutkan kekuasaan. Dewasa ini, dinasti politik tidak dilakukan secara tradisional lagi, meskipun masih ada beberapa negara yang menerapkan secara tradisional. Dimana dulu dilakukan secara turun temurun, sedangkan sekarang terutama negara yang berasaskan demokrasi, dilakukan secara prosedural lewat jalur politik dalam hal ini Pemilihan Umum. Nantinya keturunan yang akan menjadi calon penguasa akan menggunakan kendaraan politiknya, dalam hal ini menggunakan partai politik untuk bisa berkompetensi dalam merebutkan kursi kekuasaan (MKRI, 2015).

Politik dinasti dengan dinasti politik tentunya merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi akan saling berhubungan pada akhirnya. Jika

politik dinasti dilaksanakan oleh para elit lokal yang berupaya untuk membangun kekuasaan untuk nantinya akan dijalankan oleh keluarga elit tersebut. Biasanya, ditandai dengan calon pemimpin yang berasal dari lingkungan keluarga kepala daerah yang sedang berkuasa. Lain hal dengan dinasti politik, dinasti politik dilakukan oleh para elit agar kekuasaan yang dimiliki bisa bertahan dengan strategi menurunkan kekuasaannya kepada orang yang mempunyai hubungan darah atau kekeluargaan. Dinasti politik akan menciptakan suatu lingkaran kekuasaan yang berisikan anggota keluarga, dan kerabat. Lingkaran kekuasaan ini juga meliputi suatu jabatan yang strategis yang diperoleh dari pemilihan umum, bisa pilkada untuk nantinya menjadi pemimpin di daerahnya. Kesamaan dari politik dinasti dan dinasti politik yaitu sama-sama ingin menjaga kekuasaan yang sudah dimilikinya.

Selanjutnya, berbicara mengenai dinasti politik tentunya mempunyai pengertian bermacam-macam yang disampaikan oleh beberapa tokoh ataupun pakar politik. Menurut Asako (2015) dinasti politik dipahami sebagai terjadinya salah satu anggota keluarga yang menduduki jabatan politik yang anggota keluarga sebelumnya sudah menduduki jabatan politik tersebut. Maksud dari pengertian Asako ialah salah satu yang termasuk ke dalam kategori dinasti politik merupakan melanjutkan jabatan yang serupa dengan anggota keluarga lainnya. Menurut Pablo Querubin dinasti politik merupakan “sebuah distribusi kekuasaan yang di dominasi oleh satu keluarga pada wilayah geografis

masing-masing”. Marcus Mietzner (2009:20) mengungkapkan bahwa dewasa ini dinasti politik lebih dikenal sebagai elite politik yang berbasiskan dari adanya hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Djati (2013:204) menjabarkan definisi dinasti politik sebagai “sebuah strategi politik yang akan digunakan untuk menjaga kekuasaannya dengan cara mewariskan kekuasaannya kepada orang yang notabene nya merupakan anggota keluarganya sendiri”.

Sebagaimana diketahui, bahwasannya dinasti politik sudah barang tentu dijalankan oleh elit yang memang sedang atau mempunyai kekuasaan politik. Dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaannya, elit politik ini kemudian menunjuk anggota keluarganya yang dianggap berokompeten untuk menjaga kekuasaan politik dengan cara demokratis, dalam hal ini dilakukan dengan pemilihan umum. Bahasan tentang dinasti politik dalam ruang lingkup politik lokal sangat berbeda jauh dengan bahasan dinasti politik dalam ruang lingkup nasional. Dalam ruang lingkup lokal misalnya, sering ditemukan sebuah romantisasi nama besar dari keluarga pertahana yang notabene menjamin keberlangsungan dinasti politik tersebut.

Dinasti politik bisa sebut juga sebagai keluarga politik. Dalam hal ini, purwaningsih (2015) mengkategorikan beberapa dimensi keluarga politik sesuai dengan situasinya, di antaranya : dimensi waktu (keluarga yang sudah menjabat sebelumnya, minimal dua periode), dimensi jumlah (dua anggota keluarga yang melanjutkan jabatan sebelumnya),

dimensi jabatan politik (jabatan politik yang sama dengan sebelumnya, bisa juga jabatan berbeda), dan terakhir dimensi kekuasaan (dilakukan dengan maksud memperluas atau mempertahankan kekuasaan). Penyerdahanaan dimensi keluarga politik ini agar dapat dipahami mengenai manifestasi dari dinasti politik tersebut.

2. Faktor Terbentuknya Dinasti Politik

Keberadaan dinasti politik di Indonesia nyatanya sudah ada sejak jaman orde baru. Di jaman orde baru, banyak anggota keluarga dan kerabat terdekat dari keluarga Presiden Soeharto ditempatkan untuk mengisi jabatan-jabatan penting dan strategis. Sehingga itu yang menyebabkan terjadinya praktik nepotisme. Hingga sekarang di era reformasi pun, faktanya praktik dinasti politik makin bertambah di daerah Indonesia. Salah satu contoh yang terkenal dengan dinasti politiknya yaitu di daerah Banten dengan dinasti Ratu Atut.

Melihat situasi dinasti politik yang terjadi di Indonesia ini bisa dianalisis oleh adanya faktor yang membentuk dinasti politik tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi atau membentuk adanya dinasti politik :

Patronase Politik

Patronase politik merupakan sebuah proses pembagian keuntungan antara para elit politisi untuk memberikan sesuatu secara eksklusif kepada para pemilih, pekerja, atau kepada masyarakat umum untuk mendapatkan dukungan politik dari

mereka. Maksud dari pemberian sesuatu secara eksklusif ini bisa berupa pemberian uang tunai langsung, jasa, barang, serta keuntungan yang menyangkut ekonomi.

Patronase politik ini bisa dipandang sebagai kekuatan yang sudah terikat satu sama lain bisa memainkan suatu peranan yang penting di dalam sistem politik tertentu. Seperti misal, patron atau dalam hal ini politisi akan menempati orang-orang terdekatnya untuk mengamankan pos-pos yang penting di dalam elemen pemerintahan dan masyarakat. Hal ini dikarenakan mengingat elit tunggal atau patron ini sebenarnya secara kuantitas relatif sedikit dibandingkan dengan masyarakat, maka itu dilakukan agar bisa mengefektifkan kekuasaan dan mengantisipasi jika terjadi pergolakan di masyarakat.

Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik menurut Gabriel Almond yang termuat dalam buku Sosialisasi Politik merupakan sebuah proses yang memperlihatkan pembentukan serta tingkah laku politik yang tujuannya untuk diwariskan nilai-nilai politik kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, sosialisasi politik juga akan menentukan suatu persepsi dari setiap individu mengenai sesuatu yang berbau politik.

Di dalam partisipasi politik ada beberapa agen sosialisasi politik, salah satunya ialah keluarga yang merupakan agen pertama yang membentuk atau melakukan proses sosialisasi. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwasannya keluarga mempunyai andil yang besar dalam membentuk suatu pengetahuan politik bagi anggota keluarganya. Di dalam konteks ini, sosialisasi politik yang dibangun oleh keluarga bisa membentuk sebuah dinasti politik. Hal ini dikarenakan adanya pengetahuan politik dari sang keluarga yang nantinya akan diwariskan mengenai nilai-nilai politik kepada anak. Seperti contoh, ketika seorang bupati yang sudah mempunyai *image* politik yang positif di daerahnya kemudian ketika masa jabatannya habis, maka bupati tersebut (dalam hal ini misal seorang suami) akan mencoba memberikan pemahaman/nilai-nilai politiknya untuk diwariskan kepada anggota keluarga yang akan berminat terhadap politik.

Kaderisasi Politik yang lemah

Dalam proses Pemilihan Umum, partai politik diibaratkan sebagai kendaraan politik untuk para calon yang akan maju di Pemilu. Dalam proses penjurian calon itu, dibutuhkan juga proses kaderisasi untuk membentuk sebuah calon yang ideal yang harus melibatkan komponen dasar yaitu mempunyai integritas, mempunyai rekam jejak yang dimiliki dan juga

penyelarasan visi dan misinya apakah sesuai dengan ideologi dari partai politik tersebut. Akan tetapi, partai politik yang dirasa cukup pragmatis hanya melihat calon yang akan diusung berdasarkan oleh kedekatan hubungan dengan para elite atau keluarga politik, dan juga dari kemampuan modal finansialnya.

3. Tipologi Dinasti Politik

Tipologi-tipologi dari dinasti politik begitu penting untuk bisa melihat bagaimana pola karakteristik dari dinasti politik itu terbentuk. Pola karakteristik ini bisa disebabkan oleh budaya, lingkungan, sejarah, dan juga demografis. Djati (2014) menjelaskan seperti yang termuat dalam buku *Dinasti Politik di Aras Lokal* bahwasannya terdapat empat macam tipologi dari dinasti politik.

a. (*Populism Dynasties*) Dinasti Berbentuk Populisme

Pada tipe ini, *Populism Dynasties* merupakan sebuah tipe yang berusaha untuk melanggengkan serta mengamankan program yang sudah dibentuk dan dijalankan oleh kepala daerah sebelumnya / pertahana. Pada Dinasti tipe ini juga berusaha untuk melahirkan calon yang sejalan dengan kepala daerah sebelumnya dalam rangka mengangkat kembali program populis pertahana untuk dijadikan sebagai modal kampanye politik dalam memenangkan pemilihan umum.

Tipe dinasti politik populisme ini bisa ditemukan dan diamati pada daerah-daerah Indramayu, Bantul dan Kendal. Pada

ketiga daerah ini ditemukan sebuah kasus yang dimana pengganti dari Bupati sebelumnya merupakan dari sanak familinya sendiri yaitu istrinya. Dalam situasi tersebut, sang istri dipilih dan didukung oleh suaminya untuk maju dalam pemilihan Bupati, sementara sang suami dari balik layar memberikan sebuah arahan dan strategi untuk sang istri guna melanjutkan program yang sudah dijalani sebelumnya. Selain itu juga, adanya dukungan dari berbagai masyarakat yang menginginkan adanya calon yang berasal dari anggota keluarga pertahana agar bisa dicalonkan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya sebuah romantisme dari ketiga Bupati sebelumnya yang sudah dianggap berjasa membangun daerahnya dari segala aspek kebijakan yang dibuatnya.

Di dalam dinasti politik populisme ini, terdapat sebuah kecondongan mengarah kepada oligarki. Akan tetapi, oligarki tidak terlalu kuat dikarenakan adanya sebuah populisme dan romantisme yang akan menyatu dengan oligarki (Djati, 2014).

b. (*Octopussy Dynasties*) Dinasti Berbentuk Jaringan Kekuasaan

Pada tipologi *Octopussy* merupakan sebuah tipe dinasti politik yang dibentuk karena adanya jaringan kekuasaan. Tipe *Octopussy* ini bisa terbentuk didasari oleh seorang pemimpin yang kharismatik serta mampu bersinegri dengan aktor politik baik yang formal maupun yang informal. Pada dinasti *octopussy*

ini sudah dirancang dan direncanakan sebaik mungkin oleh pertahana agar para keluarga dan kerabatnya bisa menempati jabatan politik. Salah satu contoh daerah yang termasuk ke dalam jenis ini adalah di daerah Banten dengan dinasti Ratu Atut. Di daerah Banten, Ratu Atut memperbesar jaringan kekuasaannya dengan menenempatkan para keluarga dan kerabatnya pada jabatan politik di Banten. Tipe dinasti *octupussy* ini terdapat sebuah kecondongan mengarah kepada oligarkis yang kuat.

c. (*Tribalism Dynasties*) Dinasti Berbentuk Tribalisme

Tipologi *dynasties tribalism* ini merupakan sebuah jenis dinasti yang merujuk kepada kekuatan adat, marga, kekeluargaan, maupun suku. Hal ini bisa dibuktikan ketika dewasa ini, sudah diterapkan otonomi daerah dan pola desentralisasi yang berwujud kepada pemilihan kepala daerah langsung, identitas dari adat dan keluarga masih sangat kuat. Pada tipe ini budaya politik masih begitu kuat yang mana masih mempunyai sebuah ciri khas seperti nepotisme, karismatik, dan oligarkis. Dalam dinasti politik tribalisme, modal yang digunakan oleh para aktor politik yang akan maju dalam kontestasi pilkada menggunakan modal etnis, adat, dan suku.

Salah satu daerah di Indonesia yang berkaitan dengan dinasti politik tribalisme ini adalah di daerah Sulawesi Selatan. Dinasti politik tribalisme yang terjadi di Sulawesi Selatan

ditandai dengan modal yang utama, yaitu kekeluargaan politik yang berbasis pada etnisitas. Hal ini bisa dilihat pada dinasti Yasin Limpo yang mencerminkan etnis Gowa Makassar dalam menjalankan roda pemerintahan di Sulawesi Selatan.

d. (*Feudalism Dynasties*) Dinasti Berbentuk Feodalisme

Tipe dinasti feodalisme merupakan sebuah tipe dinasti yang pembentukan paling awalnya dilandasi oleh faktor sejarah. Dinasti feodalisme ini bisa ditemukan pada daerah Bali dan juga Yogyakarta. Untuk daerah Yogyakarta sendiri merupakan sebuah dinasti politik yang dimana itu semua merupakan lanjutan dari sejarah yang dulu sebagai kerajaan dan diberikan keistimewaan khusus oleh pemerintah pusat.

Dari keempat tipologi dinasti politik yang sudah dijelaskan di atas, tipe dinasti politik yang relevan dengan dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Kuningan ialah tipologi dinasti politik populisme. Hal ini dikarenakan dalam tipologi tersebut dijelaskan bahwasannya dinasti politik populisme ini berasaskan kepada romantisme dari pertahana yang sudah dianggap berjasa membangun daerahnya dari segala aspek kebijakan untuk membangun daerah.

b. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Dalam berkehidupan sosial, setiap individu atau kelompok masing-masing mempunyai sebuah persepsi yang berbeda-beda. Mereka

mendapatkan persepsi tersebut berdasarkan apa yang mereka lihat dan ketahui. Persepsi sendiri menurut Rakhmat Jalaludin (2007) merupakan suatu pengalaman yang didapat mengenai objek, peristiwa, atau hubungan yang didapatkan dengan menyimpulkan suatu informasi atau juga menafsirkan pesan. Gulo (Sobur, 2013:445) juga mendefinisikan persepsi merupakan proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu yang berada di lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Dapat dikatakan bahwa persepsi ini merupakan inti dari komunikasi. Hal ini dikarenakan jika persepsi yang didapatkan tidak akurat, maka untuk ketika berkomunikasi dengan yang lainnya akan tidak efektif dan juga persepilah yang akan menjadi penentu bagi setiap individu untuk memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Ketika persepsi tersebut dapat diterima atau mempunyai kesamaan persepsi antar individu, maka mereka akan berkomunikasi yang efektif dan akan membentuk suatu kelompok budaya dan identitas. Mulyana (Sobur, 2013:445-446). William James (dalam Putri, 2014) menjelaskan terbentuknya persepsi didapatkan dari kata-kata di lingkungan yang diserap oleh indera serta didapatkan dari pengalaman dari setiap setiap individu.

Persepsi dapat terjadi dikarenakan setiap individu mempunyai indera yang digunakan untuk mengambil atau menyerap hal-hal dan kejadian yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, lingkungan bisa berpengaruh besar terhadap perilaku individu dalam sehari-hari sehingga

nantinya akan menimbulkan reaksi spontan yang dikeluarkan pada perilaku individu tersebut, dan dengan demikian perilaku suatu individu sudah pasti tidak akan terlepas dari adanya persepsi (Putri, 2014).

Dari beberapa pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa persepsi ini merupakan suatu hasil dari adanya penyimpulan informasi dan penafsiran pesan yang didapatkan dari panca indera dan pengalaman yang didapatkan dari individu, dan diperoleh dari lingkungan sekitar. Faktor lingkungan bisa membuat persepsi yang baru atau bisa merubah persepsi yang sudah dibuat, karena proses panca indera untuk menyerap hal-hal yang ada disekitarnya. Dengan adanya persepsi yang sama, maka akan bisa membuat sebuah kelompok budaya dan identitas.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Keberadaan Adanya persepsi ini bukanlah sesuatu yang dapat terjadi begitu saja, akan tetapi ada beberapa faktor yang membuat persepsi ini hadir. Menurut Sebagian (dalam Putri, 2014) ada 3 faktor yang memunculkan persepsi dari setiap individu. Berikut penjabarannya

:

- a. Individu yang bersangkutan. Dalam hal ini, apabila seseorang yang sedang menangkap fenomena, dan berupaya untuk menafsirkan tentang fenomena yang ia tangkap, seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh karakter dari individu tersebut yang juga secara tidak langsung dapat mempengaruhi seperti sikap, kepribadian, kepentingan, pengalaman dan daya minat.

- b. Situasi. Situasi dalam persepsi merupakan salah satu pendukung bagi seseorang untuk mendapatkan persepsi. Persepsi harus dipandang secara jeli dan harus adanya sebuah perhatian untuk menyadari situasi tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya perhatian merupakan langkah pertama dalam menyadari akan adanya persepsi.
- c. Target terhadap persepsi. Target untuk menciptakan persepsi biasanya berupa benda, orang, atau suatu fenomena. Dalam hal fenomena, biasanya akan berpengaruh dalam persepsi orang dilihatnya.

Selain itu, ada beberapa faktor lainnya yang berpengaruh terhadap suatu persepsi seseorang. Seperti faktor internal (perasaan, pengalaman, kecakapan berfikir, dan motivasi seseorang) dan faktor eksternal (stimulus dan kejadian lingkungan yang dimana persepsi itu hadir) Jalaludin (dalam Putri,2014). Kasali (dalam Putri, 2014) juga mengungkapkan ada beberapa faktor yang menentukan adanya suatu persepsi, seperti latar belakang budaya lingkungan, nilai-nilai yang mereka anut, adanya pengalaman masa lalu, dan informasi-informasi yang sedang berkembang pesat. Dalam penelitian ini, salah satu faktor yang dianggap relevan menurut penulis ialah faktor menurut Kasali yang dikutip oleh Putri (2014). Hal ini dikarenakan salah satu faktor yang disebut oleh Kasali ialah

latar belakang budaya lingkungan dan pengalaman masa lalu yang bisa membuat persepsi seseorang terbentuk.

Selain itu, menurut Bambang yang mengutip pendapat dari Abu Ahmadi ada beberapa komponen yang membentuk suatu persepsi yaitu yang pertama ada komponen kognitif yang merupakan suatu pengolahan pemikiran yang didasari oleh pengetahuan kepada objek tertentu. Kemudian ada komponen afektif yang merupakan proses pembentukan persepsi yang didasari oleh adanya perasaan individu terhadap objek yang diamatinya. Kemudian komponen konatif yang merupakan sebuah proses kecenderungan untuk melakukan hal terhadap objek. Misalnya kecenderungan memberi bantuan, memberikan penolakan, dan sebagainya.

c. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah sangat penting untuk dilaksanakan bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dalam suatu sistem pemerintahan jika tidak ada partisipasi langsung dari rakyat sama saja dianggap menciderai demokrasi itu sendiri (Mariana dan Paskarina, 2008:32). Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah proses pemilihan pemimpin dalam ruang lingkup kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dilaksanakan setiap masa kepemimpinan itu berakhir. Joko J. Prihantoro (Fajlurrahman Jurdi, 2019) mengartikan kepala daerah sebagai “rekrutmen politik, yaitu

penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota”.

Di Indonesia, pelaksanaan pilkada berpacu kepada keenam asas yang dimana ada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas langsung merupakan hak pemilih bagi rakyat yang secara langsung memilih kepala daerah tanpa ada perantara. Asas umum adalah asas yang dimana pemilih mempunyai kesempatan untuk memilih yang sama tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Asas bebas adalah asas yang dimana pemilih bebas untuk memilih siapa saja kepala daerah sesuai dengan hati nuraninya dan akan dijamin kemanannya. Asas rahasia merupakan asas yang melindungi suara pemilih sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain dan bersifat privat. Asas jujur merupakan asas yang dimana pilkada diselenggarakan dengan jujur, terbuka, dan tidak ada bumbu kecurangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Terakhir, asas adil merupakan asas yang menjamin kontestan pilkada mendapatkan perlakuan yang adil atau sama, tidak berat sebelah, serta bebas dari keberpihakan manapun.

Pelaksanaan pilkada secara langsung diselenggarakan pertama kali pada tahun 2005 yang merujuk pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan merujuk kepada UU No 32 Tahun 2004, maka mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia akan mengalami perubahan, yang dimana sebelumnya kepala daerah

dipilih oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sekarang menjadi dipilih langsung oleh masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih. Pilkada langsung merupakan pilkada yang dilaksanakan dan dipilih secara langsung oleh pemilih yang sudah memenuhi persyaratan. Keterlibatan masyarakat dalam pilkada secara langsung bisa dilihat secara dengan jelas dalam mekanisme kegiatan. Hal ini dikarenakan bahwa selain partai politik dan calon kepala daerah, masyarakat merupakan sebuah subjek atau aktor politik di dalam negara demokrasi. Mereka bisa menjadi pemilih, bisa memantau, mengawas dan bahkan bisa menjadi penyelenggara. Bisa dilihat dalam pilkada langsung ada beberapa mekanisme kegiatan seperti pendaftaran pemilih yang telah memenuhi syarat, kegiatan kampanye, kegiatan pemungutan suara, serta kegiatan lainnya.

Ada beberapa patokan atau capaian untuk bisa melihat terwujudnya demokrasi seperti yang dijelaskan oleh Prihatmoko (2005) yang mengutip dari Robert Dahl, Bingham Powel, dan Samuel Huntington. Berikut adalah penjelasannya :

a. Menggunakan pemilihan umum dengan mekanisme yang teratur

Dalam memilih wakil yang merepresntasikan rakyat atau calon kepala daerah harus dilakukan dengan cara pemilihan umum yang dilaksanakan dengan mekanisme yang teratur. Mekanisme teratur disini seperti seperti penjadwal tenggang waktu yang jelas, dilaksanakan secara jujur, adil, dan kompetitif. Hal ini menjadi

utama dikarenakan pemilu merupakan langkah awal yang harus dilewati untuk membentuk sebuah demokrasi. Selanjutnya setelah pemilihan telah selesai diselenggarakan dan sudah tau siapa yang menang, publik akan melihat serta menilai kinerja yang akan dilakukan dan memenuhi janji-janji yang sudah dibuat. Adanya bentuk penilaian ini akan membentuk sebuah evaluasi bagi para pejabat politik yang akan digunakan sebagai patokan apabila di pemilihan selanjutnya akan maju kembali.

b. Adanya rotasi kekuasaan yang memungkinkan

Adanya rotasi kekuasaan juga merupakan sebuah patokan demokratis atau tidaknya dalam hal rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan disini mengibaratkan bahwa sebuah kekuasaan tidak boleh diteruskan oleh seseorang, seperti dalam halnya pada sistem monarki. Artinya, estafet kekuasaan harus dilakukan secara teratur dari seseorang kepala daerah ke kepala daerah lain yang tidak mempunyai garis keturunan, atau dari satu partai politik ke satu partai politik lainnya.

c. Tahapan perekrutan dilakukan secara terbuka

Dalam sistem demokrasi akan memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua orang atau kelompok untuk mengadakan kompetisi (pemilu) karena mempunyai hak yang sama. Oleh sebab itu, untuk mengisi jabatan politik dalam hal ini misalnya kepala daerah, harus membuka peluang yang terbuka untuk semua orang

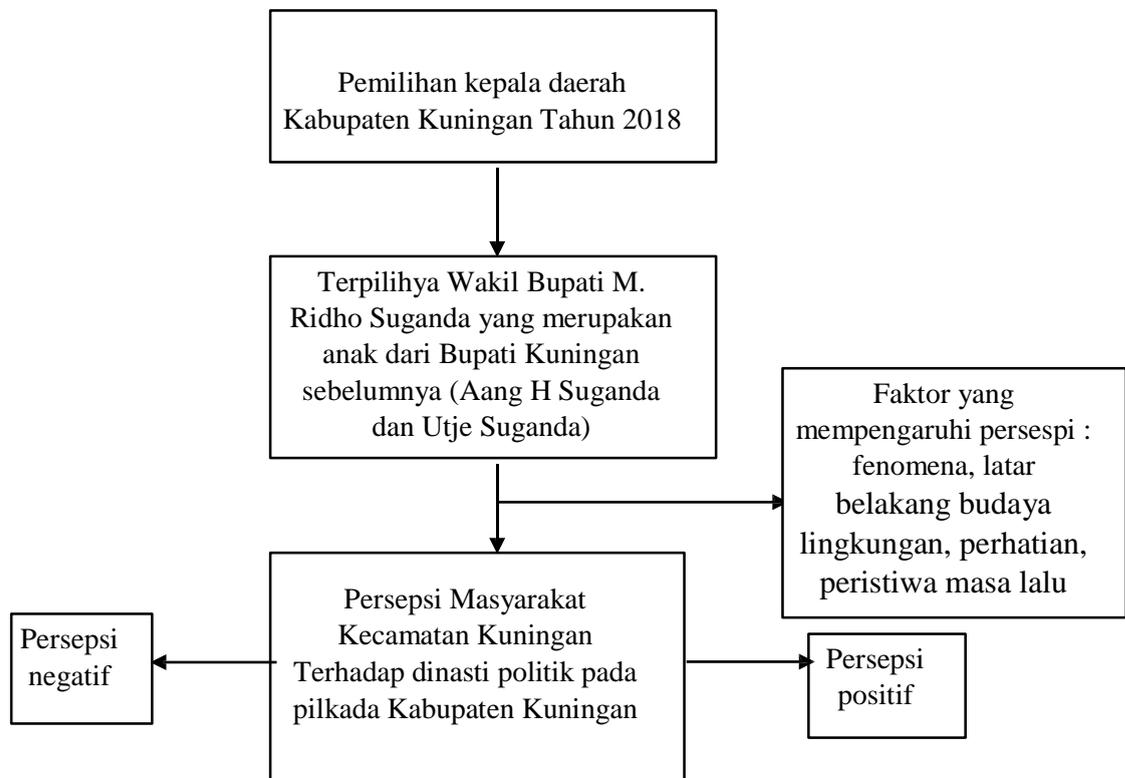
yang telah mencapai syarat yang sesuai dengan aturan, dengan kompetensi yang telah disepakati.

d. Adanya akuntabilitas kepada publik

Para pemangku jabatan politik yang telah dipilih tentunya harus bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat umum mengenai kinerja atau kebijakan selama ia menjabat, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Seperti misalnya pejabat politik ataupun kepala daerah dituntut untuk bisa menjelaskan mengapa memilih kebijakan C dibanding memilih kebijakan D, menjelaskan keterlibatan keluarga atau kerabat terdekat terkait dengan kedudukan jabatan tersebut.

Dewasa ini, pelaksanaan pilkada secara langsung sudah melakukan penyerdehanaan. Penyerdehanaan yang dimaksud merupakan proses pilkada yang dilakukan secara serentak yang ditinjau dari daerah yang masa jabatannya berakhir berdekatan. Pilkada langsung secara serentak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015, yang kemudian berlanjut pada tahun 2017, 2018 dan terakhir kemarin 2020 (Fajlurrahman Jurdi, 2019).

B. Kerangka Berpikir



Pada alur penelitian ini dapat dilihat dari kerangka berfikir yang sudah dibuat di atas dan akan dijelaskan secara garis besarnya saja. Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di daerah Jawa Barat Diantara Kabupaten/Kota yang mengikuti pilkada serentak pada tahun 2018, Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Kabupaten yang pelaksanaanya sangat menarik. Hal ini dikarenakan sepanjang pilkada dilaksanakan di Kabupaten Kuningan, terdapat keluarga dari Aang Hamid Suganda yang berpartisipasi untuk maju menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, dan sepanjang historisnya berhasil memenangkan pilkada tersebut.

Pemenang pilkada Kabupaten Kuningan dengan masa jabatan 2018-2023, ialah pasangan Acep Purnama dan Muhammad Ridho Suganda.

Ridho Suganda sendiri merupakan anak terakhir dari pasangan Aang Hamid Suganda dan Utje Suganda yang tidak lain merupakan Bupati Kuningan sebelumnya. Dalam hal proses pilkada, di sini pemilih akan mempunyai suatu penilaian yang berbeda antar pemilih lainnya. Hal ini dikarenakan adanya sebuah proses persepsi.

Banyak faktor yang memungkinkan proses persepsi ini berjalan, seperti melihat suatu fenomena dan merekam lewat panca indera seseorang, kemudian juga bisa juga melihat suatu fenomena dengan mempertimbangkan dari latar belakang budaya lingkungannya ataupun peristiwa masa lalu. Proses persepsi ini akan mengadirkan suatu ransangan untuk mendapatkan perhatian, dan setelah seseorang telah mendapatkan persepsinya, persepsi yang dihadirkan bisa berupa sebuah persepsi yang positif dan bisa saja yang negatif setelah apa yang ia lihat dan mencernanya.

C. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022) hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah dibuat dan akan segera diuji secara empiris.

Berikut adalah hipotesis di dalam penelitian ini :

H_{0a} : Terdapat persepsi negatif masyarakat Kecamatan Kuningan terhadap dinasti politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

H_{1a} : terdapat persepsi positif masyarakat Kecamatan Kuningan terhadap dinasti politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2018

$H0_b$: tidak adanya pengaruh yang signifikan antara persepsi masyarakat Kecamatan Kuningan terhadap terbentuknya dinasti politik di Kabupaten Kuningan.

$H1_b$: ada pengaruh yang signifikan antara persepsi masyarakat Kecamatan Kuningan terhadap terbentuknya dinasti politik di Kabupaten Kuningan.